

**PROSEDUR PENGAJUAN KERJA SAMA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KESEHATAN KANTOR CABANG DENPASAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH :

DEMI ACIMA BR SILALAH

NIM 2015713162

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2023

**PROSEDUR PENGAJUAN KERJA SAMA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KESEHATAN KANTOR CABANG DENPASAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH :

DEMI ACIMA BR SILALAH

NIM 2015713162

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Demi Acima Br Silalahi

NIM : 2015713162

Jurusan : Administrasi Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir saya dengan judul:

"Prosedur Pengajuan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Denpasar"

adalah memang benar asli karya saya. Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, dan atau sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah Tugas Akhir ini dan disebutkan pada daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan menerima sanksi akademis dalam bentuk apapun.

Badung, 25 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Demi Acima Br Silalahi
NIM. 2015713162

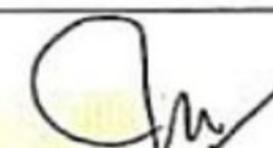
Lembar Persetujuan dan Pengesahan

**PROSEDUR PENGAJUAN KERJA SAMA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KANTOR CABANG DENPASAR**

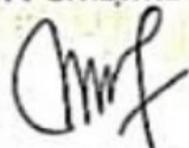
Tugas akhir ini diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh Ijazah Diploma Tiga
Program Studi Administrasi Bisnis pada Jurusan Administrasi Bisnis
Politeknik Negeri Bali

Demi Acima Br Silalahi
NIM 2015713162

Badung, 25 Agustus 2023
Disetujui oleh,

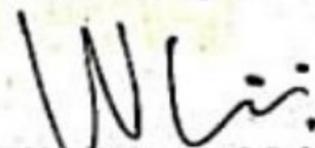
Nama Penguji	Tanda Tangan
Ketua Dosen Penguji, Ni Nyoman Supiatni, SE., M.Si NIP. 196212311990032003	
Dosen Penguji 1, Ida Bagus Gede Dananjaya, S.E., M.M NIP. 0009049305	
Dosen Penguji 2, Dra. Ni Ketut Narti, MM NIP. 196212311994032003	

Dosen Pembimbing 1,



(Ni Nyoman Supiatni, SE., M.Si)
NIP. 196212311990032003

Dosen Pembimbing 2.



(I Made Wdiantara, S.Psi., M.Si)
NIP. 197902182003121002

Disahkan oleh,
Jurusan Administrasi Bisnis
Ketua,



(Nyoman Indah Kusuma Dewi, SE.,MBA.,Ph.D)
NIP. 196409291990032003

Diketahui oleh,
Program Studi Administrasi Bisnis
Ketua,



(I Made Wdiantara, S.Psi.,M.Si)
NIP. 197902182003121002

PRAKATA

Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Pengajuan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Denpasar”** dapat penulis selesaikan tepat pada waktu yang diberikan. Adapun yang menjadi tujuan pembuatan Tugas Akhir ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh ijazah Diploma III Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali. Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh dukungan mental dan semangat dari berbagai pihak, maka dari itu penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak bersangkutan, khususnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali
2. Ibu Nyoman Indah Kusuma Dewi, SE., MBA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis yang telah mendukung melalui penyediaan fasilitas belajar di Jurusan Administrasi Bisnis.
3. Bapak I Made Widiantera, S.Psi., M.Si selaku Ketua Program Study D III Administrasi Bisnis dan sebagai pembimbing II, atas segala dukungan baik itu fasilitas, saran, dan masukan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Ni Nyoman Supiatni, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tepat waktu.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar beserta staff pegawai di Jurusan Administrasi Bisnis yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan.
6. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu selama masa penyusunan Tugas Akhir ini.

7. Kepada Ibu Ina Oktika selaku Kepala Bidang Mutu Layanan Faskes yang selalu mendukung dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini.
8. Kepada Kakak Pinastiko dan seluruh staff BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar yang sudah memberi dukungan dan semangat.
9. Untuk Bapak, Mamak, Abang, Bou, *Uncle* dan seluruh keluarga sebagai penyumbang *support system* terbesar untuk penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini, *I love you so much guys and grateful to have you all. May God always bless our family.*
10. Kepada seluruh teman seperjuangan yang selalu memberi semangat dan diskusi selama penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa masih memiliki banyak kekurangan jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap laporan PKL ini dapat bermanfaat untuk para pembaca, khususnya bagi mahasiswa/i Politeknik Negeri Bali guna menambah pengetahuan. Sekian dan terima kasih.

Jimbaran, 14 Juli 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Lokasi Penelitian.....	10
2. Objek Penelitian.....	10
3. Data Penelitian.....	11
4. Teknik Analisis Data.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Prosedur.....	17
B. Kerja Sama.....	26
C. Fasilitas Kesehatan.....	27
D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.....	30
E. Kerja Sama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.....	30
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
A. Sejarah Perusahaan.....	33
B. Bidang Usaha.....	37

C. Struktur Organisasi Dan Uraian Jabatan.....	41
1. Struktur Organisasi	41
2. Uraian Jabatan.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Kebijakan Perusahaan	47
B. Analisis Dan Interpretasi Data.....	51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah FKTP Yang Kerja Sama Dengan BPJS KC Denpasar Tahun 2021.....	5
Tabel 1.2 Jumlah FKTP Yang Kerja Sama Dengan BPJS KC Denpasar Tahun 2022.....	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jenis-jenis Simbol Flowchart.....	24
Gambar 3.1 Logo BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar.....	35
Gambar 3.2 Struktur Organisasi BPJS Kesehatan KC Denpasar.....	41
Gambar 4.1 flowchart Prosedur Pengajuan Kerja Sama FKTP dengan BPJS Kesehatan KC Denpasar.....	50
Gambar 4.2 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Contoh Surat Pengajuan Kerja sama
- Lampiran 2. Dokumentasi Pengajuan Kerja Sama Melalui *Email*
- Lampiran 3. Formulir *Selfassesment*
- Lampiran 4. Form Aplikasi Pengajuan Kerja Sama
- Lampiran 5. Pakta Integritas FKTP
- Lampiran 6. Form Komitmen FKTP BPJS Kesehatan (DPP)
- Lampiran 7. Dokumentasi Kredensialing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak untuk hidup merupakan salah satu hak dasar manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam mewujudkan hak tersebut dibutuhkan kesehatan dan kondisi prima sebagai manusia, dengan salah satu upaya yaitu menghadirkan jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Pelayanan kesehatan bertujuan guna memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah, menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat luas yang dilakukan bersama ataupun perseorangan. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan kewajiban dasar pemerintah sesuai landasan Undang- Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Diperjelas dengan pasal

34 ayat 3 dengan isi “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Untuk menjamin masyarakat luas memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, Pemerintah Indonesia pada tahun 2004 menetapkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai amanat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang layak untuk menjamin masyarakat dengan cakupan skala nasional yang terdiri dari 5 (lima) program diantaranya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan menjamin pemeliharaan kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bertujuan menjamin apabila mengalami kecelakaan atau menderita penyakit akibat kerja, Jaminan Hari Tua (JHT) bertujuan menjamin masa pensiun dan mengalami cacat total atau meninggal dunia, Jaminan Pensiun bertujuan menjamin saat mengalami kehilangan atau kekurangan penghasilan akibat memasuki usia pensiun dan Jaminan Kematian yang bertujuan untuk memberikan santunan kematian pada ahli waris yang ditunjuk pihak yang meninggal.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), untuk menjalankan 5 (lima) program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tersebut, Pemerintah menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan pembagian Program Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

BPJS Kesehatan adalah badan hukum pemerintahan dimana berkewajiban menjamin dan memberi layanan kesehatan kepada masyarakat, yang bertanggung jawab kepada presiden dengan dibawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia langsung. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, memutuskan PT ASKES (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan akhirnya berubah menjadi BPJS Kesehatan, hal tersebut terhitung dengan resmi pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan kemudian langsung mulai beroperasi untuk memberikan manfaat jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah masyarakat untuk memastikan perlindungan jaminan kesehatan yang komprehensif, andil dan merata.

BPJS Kesehatan tersebar diseluruh wilayah Indonesia dengan memiliki pembagian 12 kantor kedeputian wilayah dan 127 kantor cabang dan 388 kantor kabupaten/kota yang dapat melayani peserta JKN-KIS di seluruh wilayah Indonesia, yang salah satunya adalah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar. Dalam memberikan

jaminan kesehatan secara merata, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan (FASKES) yang berada di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan dengan dibantu oleh Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Badung dan Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Tabanan. Fasilitas Kesehatan (FASKES) adalah instansi kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Fasilitas Kesehatan terbagi menjadi dua, yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan instansi kesehatan baik dari pemerintah maupun swasta yang memberikan pelayanan kesehatan ataupun penanganan medis dasar bagi peserta BPJS Kesehatan. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berasal dari instansi kesehatan pemerintah berupa puskesmas dan instansi kesehatan swasta berupa klinik pratama, praktek dokter umum, dan praktek dokter gigi.

Hubungan kerja sama yang terjalin diantara dua belah pihak yaitu BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) memiliki tujuan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan dasar dengan maksimal melalui fasilitas kesehatan yang ditunjang tenaga ahli medis yang memiliki kompetensi dibidang kesehatan dan sarana-prasarana yang lengkap. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang berkerja sama dengan BPJS

Kesehatan Kantor Cabang Kota Denpasar tersebar di 3 (tiga) wilayah kabupaten/kota, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah melalui BPJS Kesehatan dalam menjamin kesehatan masyarakat secara merata, dalam hal ini di wilayah Provinsi Bali. Berikut merupakan jumlah data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang resmi menjalin kerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir.

Tabel 1.1 Jumlah FKTP Yang Kerja Sama Dengan BPJS KC Denpasar Tahun 2021

No	Jenis FKTP	Kota Denpasar	Kab. Badung	Kab. Tabanan	Total
1	Puskesmas	11	13	20	44
2	Klinik TNI	3	1	2	6
3	Klinik Pratama	26	35	3	64
4	Klinik Polri	3	1	1	5
5	DPP	54	76	37	167
6	Dokter Gigi	18	19	14	51
Jumlah Total					337

(Sumber: Data Yang Telah Diolah Dari BPJS Kesehatan KC Denpasar Tahun 2021)

Tabel 1.2 Jumlah FKTP Yang Kerja Sama Dengan BPJS KC
Denpasar Tahun 2022

No	Jenis FKTP	Kota Denpasar	Kab. Badung	Kab. Tabanan	Total
1	Puskesmas	11	13	20	44
2	Klinik TNI	3	1	1	5
3	Klinik Pratama	26	38	3	67
4	Klinik Polri	3	1	1	5
5	DPP	54	77	36	167
6	Dokter Gigi	17	21	14	52
Jumlah Total					340

*(Sumber: Data Yang Telah Diolah Dari BPJS Kesehatan KC
Denpasar Tahun 2022)*

Pada data dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa telah terjadi perubahan jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar sejak dua tahun terakhir yaitu tahun 2021 menuju 2022 antara hubungan kerja sama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar dengan pihak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Perubahan jumlah paling menonjol berasal dari klinik swasta dan dokter praktker perorangan (DPP). Dari data tersebut diketahui terjadi peningkatan kerja sama yang dapat terjalin dengan pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar.

Sebelum terjalinnya kerja sama antara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan BPJS Kesehatan terdapat beberapa

tahap proses pengajuan kerja sama. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mengajukan kerja sama harus memenuhi syarat dan kriteria yang diberikan oleh pihak BPJS Kesehatan. Hal ini bertujuan mengetahui dan memilih bahwa calon Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) memiliki sumber daya manusia yang memenuhi syarat kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman dalam bidang kesehatan serta sarana-prasarana pelayanan kesehatan yang layak dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh BPJS Kesehatan, maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas langkah – langkah dalam pengajuan kerja sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan BPJS Kesehatan dengan mengambil judul tugas akhir **”PROSEDUR PENGAJUAN KERJA SAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN KANTOR CABANG DENPASAR”**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari urain latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok masalahnya adalah :

1. Bagaimana prosedur pengajuan kerja sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar?
2. Apa saja kendala dalam prosedur pengajuan kerja sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Denpasar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan kerja sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar.
2. Untuk mengetahui kendala dalam prosedur pengajuan kerja sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan Diploma III Program Studi Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali.
- b. Untuk mengaplikasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh pada masa perkuliahan dengan kenyataan langsung di lapangan kerja.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian tugas akhir di bidang yang sama serta sebagai informasi bagi mahasiswa jurusan administrasi bisnis yang nantinya diharapkan menjadi bahan tambahan untuk dapat dikembangkan dalam mata kuliah yang memiliki keterkaitan dengan materi kuliah.
- b. Menjadi referensi dan masukan dalam kegiatan belajar serta bahan untuk memperkaya bahan bacaan di Politeknik Negeri Bali.

- c. Sebagai pembandingan antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan praktek di dunia kerja.

3. Bagi Perusahaan

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam rangka mengetahui efektivitas dalam pelaksanaan prosedur pengajuan kerja sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan BPJS Kesehatan Denpasar yang dilakukan di BPJS Kesehatan Cabang Denpasar.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi dan masukan dalam pelaksanaan penanganan prosedur pengajuan kerja sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan BPJS Kesehatan Denpasar yang efektif pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar, Jalan D.I Panjaitan No.6 Niti Mandala Denpasar, Denpasar, Bali.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah topik permasalahan yang akan dikaji dalam suatu penelitian, dimana dalam hal ini peneliti

memiliki ketertarikan atas prosedur pengajuan kerja sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Denpasar.

3. Data Penelitian

a. Jenis Data

1) Data Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2019:13) berpendapat bahwa “Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit)”, data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

2) Data Kualitatif

Sedangkan menurut Sugiyono (2019:18) berpendapat “penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah”, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data ini akan bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna dari generalisasi. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana menurut Nazir (2014:43) mengatakan bahwa “metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan uraian.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder, menjelaskan sebagai berikut:

1) Data Primer

Sugiyono (2019:296) berpendapat bahwa “data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)”. Data primer dapat berupa opini narasumber secara individual maupun kelompok, dan observasi. Metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan data ini yaitu metode

wawancara dan observasi langsung, dimana kemudian akan diolah oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Dalam hal ini Sugiyono (2019:297) berpendapat bahwa “data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, dimana maksudnya yaitu data diperoleh atau dicatat oleh pihak lain”. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip. Dapat berupa contoh seperti struktur organisasi.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam pelaksanaan penelitian, hal ini dikarenakan tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Berdasarkan dari bukunya, Sugiyono (2019:297) menuliskan bahwa “observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan, melalui observasi peneliti belajar

tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut”. Data tersebut dikumpulkan sebagai alat dan bahan, sehingga fokus pada penelitian akan tergambar dengan jelas. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa maupun fenomena yang menjadi fokus penelitian, dimana dalam penelitian ini penulis menjadikan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar sebagai objek observasi.

2) Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2019:231) berpendapat bahwa “wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang wajib diteliti atau untuk mengetahui hal-hal mendalam lainnya”. Wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan tanya jawab langsung dengan narasumber, yang berkedudukan sebagai staf bidang penjamin manfaat primer yang memiliki tanggung jawab langsung dalam proses seleksi penerimaan calon Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) baru. Adapun metode wawancara yang digunakan yaitu dengan wawancara tak terstruktur, dimana dalam bukunya,

Sugiyono (2019:234) berpendapat bahwa “wawancara tak berstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya”. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

3) Studi Pustaka

Dalam bukunya (Sugiyono, 2017:291) berpendapat bahwa “studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti”, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur- literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Data yang diambil penulis dalam metode kepustakaan ini berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis, buku-buku literatur, dan penelitian sejenisnya.

4) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019:314) berpendapat bahwa “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang”. Hal ini merupakan pelengkap dari kedua metode sebelumnya yaitu observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif agar lebih kredibel dan terpercaya, seperti kelengkapan data pendukung seperti foto- foto hasil observasi, sejarah, dan karya tulis yang telah ada.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019:244) berpendapat bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis” data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

- 1. Prosedur Pengajuan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Denpasar.**

Dari pembahasan tentang prosedur pengajuan kerja sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan BPJS Kesehatan Kantor Denpasar, dapat disimpulkan bahwa BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar dalam menjalankan program jaminan kesehatan nasional bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah puskesmas, klinik pratama, praktek dokter umum, dan praktek dokter gigi. Berikut

merupakan prosedur pengajuan kerja sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan BPJS Kesehatan yaitu:

Pada tahap pertama calon Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengajukan permohonan kerja sama ke pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar. Kemudian ditahap kedua yaitu berupa menyerahkan berkas-berkas sebagai syarat administrasi kepada pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar. Dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar melakukan kegiatan kredensialing ke lokasi calon Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melakukan praktik pelayanan kesehatan. Tahap keempat yaitu BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar melakukan analisa kebutuhan fasilitas kesehan pada daerah lokasi calon Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kemudian pada tahap kelima yaitu BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar menentukan hasil keputusan pengajuan kerjasama. Dan ada tahap akhir yaitu membuat perjanjian kerjasama dengan calon Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang sudah disetujui.

2. Kendala Yang Dialami Dan Solusi Untuk Mengatasi Kendala Tersebut Dalam Prosedur Pengajuan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dengan Badan

Pengyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Denpasar.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, selain dari kurangnya pengetahuan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam pemenuhan syarat administrasi kendala lainnya merupakan ketidak sesuaian standar fasilitas kesehatan saat dilakukan kunjungan kredensialing. Maka BPJS Kesehatan dalam menangani hal tersebut memiliki solusi berupa memberikan batas waktu tambahan selama 1 (satu) minggu hari kerja untuk pihak calon Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) agar memenuhi persyaratan yang masih memiliki kekurangan, seperti syarat administrasi dan sarana-prasarana yang dibutuhkan saat pelayanan pasien.

B. Saran

Dari pembahasan tentang prosedur pengajuan kerja sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan BPJS Kesehatan, adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tentang kelengkapan persyaratan administrasi kerja sama dan ketentuan sehingga terjadi keterlambatan prosedur pengajuan kerja sama. Maka dari itu dibutuhkan penginformasian berupa iklan ataupun sosialisai bagi para calon Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

2. Kurangnya pengetahuan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengenai ketentuan untuk dapat diterima bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, seperti lokasi praktek, kelengkapan alat medis, ketersediaan obat-obatan, jumlah tenaga medis sehingga mengakibatkan tidak lolos pengajuan kerja sama. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi agar Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum pengajuan kerja sama.
3. Dibutuhkan penjadwalan pendaftaran pengajuan kerja sama bagi calon Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Misal diadakan penerimaan pengajuan kerja sama setiap 6 (enam) bulan sekali, sehingga pada saat dilakukan kredensialing tidak terjadi penumpukan saat pengecekan lapangan.
4. Topik penelitian ini tidak menutup kemungkinan untuk diteliti dari sudut pandang Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam pengajuan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Humas Kemenko, Kesra/ES. "Mulai 1 Januari, BPJS Kesehatan Langsung Beroperasi" [https://www.kominfo.go.id/content/detail/3675/mulai-1-januari-bpjs-kesehatan-langsung-beroperasi/0/berita#:~:text=Sementara%20PT.%20Askes%20\(Persero\),beroperasi%20pada%201%20Januari%202014](https://www.kominfo.go.id/content/detail/3675/mulai-1-januari-bpjs-kesehatan-langsung-beroperasi/0/berita#:~:text=Sementara%20PT.%20Askes%20(Persero),beroperasi%20pada%201%20Januari%202014) (Diakses 28 Mei 2023)
- Humas, BPJS. "Sejarah Perjalanan Jaminan Sosila Di Indonesia" <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2013/4> (Diakses 20 Mei 2023)
- Humas, BPJS. "Struktur Organisasi" <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2010/3> (Diakses 20 Mei 2023)
- Humas, BPJS. "Landasan Hukum" <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2013/5> (Diakses 20 Mei 2023)
- Ida Nuraida. 2014. Manajemen Administrasi Perkantoran edisi revisi. Yogyakarta: PT Kanisius.
- KBBI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/klerikal> (Diakses 16 Juni 2023)
- Mulyadi, 2016. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: selemba Empat.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI. 2013. Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukmadian. 2017. Manfaat Prosedur Dalam Kegiatan Ekspor Impor Kepabeanan. Jurnal Kepabean dan Cukai. Vol 6, No.16, pp.6.
- Tambunan, R.M 2013. Standard Operating Procedures (SOP). Jakarta: Maiestas Publishing.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Wibawanto. 2017. Desain dan Pemrograman Multimedia Pembelajaran Interaktif. Jember: Cerdas Ulet Kreatif.